



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juli 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.15 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: - Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017; - Pembahasan rincian program masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2018.
Ketua Rapat	: Ir. H. Sigit Sosiantomo
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017; dan pembahasan rincian program masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat menerima penjelasan Setjen, Itjen, BPSDM-P, Balitbang Kementerian Perhubungan mengenai capaian terhadap *target* pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Setjen, Itjen, BPSDM-P, Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itjen, BPSDM-P, dan Balitbang Kementerian Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Kerja	PAGU KEBUTUHAN (Surat Menhub KU.002/12/15/PHB 2017 Tgl 31 Maret 2017)	PAGU INDIKATIF (Surat Bersama Bappenas-Kemenkeu: Pagu Indikatif Tahun 2018 No. S-398/MK.02/2017 & KU.01.01/05/2017 Tgl 9 Mei 2017)	USULAN PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2018 (Surat Menhub No. KU.002/18/18PHB 2017 Tgl 26 Mei 2017)
1.	Sekretariat Jenderal	887.031.193	469.829.636	580.135.964
2.	Inspektorat Jenderal	102.912.757	91.180.383	106.110.822
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	5.528.975.652	4.638.487.680	4.527.496.007
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan	235.786.825	114.821.969	143.830.906

3. Komisi V DPR RI bersama Setjen dan BPSDM Perhubungan sepakat untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan dan untuk memenuhi kebutuhan permintaan sumber daya manusia berkualitas yang dihasilkan dari sekolah binaan BPSDM Perhubungan.
4. Komisi V DPR RI bersama Setjen dan Balitbang Kementerian Perhubungan sepakat untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas), serta dukungan terhadap bantuan teknis penyusunan tatanan transportasi lokal dan transportasi wilayah di daerah.
5. Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 5 Juli 2017, maka Setjen, Itjen, BPSDM-P, dan Balitbang Kementerian Perhubungan bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 19 Juli 2017

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



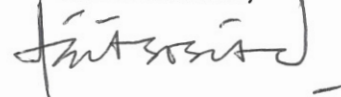
WAHJU SATRIO UTOMO

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



SUGIHARDJO

KETUA RAPAT,



SIGIT SOSIANTOMO

KEPALA BALITBANG
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

KEPALA BPSDM-P
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



DJOKO SASONO